

BAB VI

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini telah menganalisis upaya Dekolonisasi Papua Barat oleh ULMWP yang telah berdiri dari 2014 hingga sekarang menggunakan konsep Dekolonisasi menurut Frantz Fanon dan Greg Fry. Berdasarkan latar belakang historis yang terjadi di Papua Barat yang dimulai dari kolonisasi Belanda, KMB 1949, Perjanjian New York 1962 hingga PEPERA 1969 membuat isu konflik di Papua Barat ini menjadi semakin kompleks hingga sekarang. Ketidakpuasan terhadap hasil dari Pepera 1969 yang dianggap sebagai intervensi dari pemerintah Indonesia menjadikan alasan utama mengapa munculnya gerakan-gerakan kemerdekaan Papua Barat yang dianggap sebagai kolonialisme berlanjut dari Belanda ke Indonesia. Munculnya organisasi payung ULMWP menjadi upaya Dekolonisasi ini semakin terstruktur dan termobilisasi oleh aktor-aktor perjuang kemerdekaan Papua Barat.

Dalam analisis upaya internal, ULMWP bersama dengan TPNPB melakukan perlawanan bersenjata untuk menjalankan prinsip Dekolonisasi tersebut. Hal ini sejalan dengan konsep Dekolonisasi menurut Frantz Fanon yang menekankan kekerasan sebagai alat untuk mencapai Dekolonisasi yang berguna untuk pembebasan secara psikologis dan sosial atas penindasan yang terjadi selama ini. Data menunjukkan bahwa antara 2018-2022, terdapat sekitar 300 kasus kekerasan bersenjata, menyebabkan ribuan pengungsi dan korban jiwa. Hingga 2025, ancaman TPNPB-OPM terus meningkat, seperti perintah serangan terhadap aset Indonesia pada Agustus 2025, yang menewaskan warga sipil dan memicu respons militer Indonesia. Meskipun strategi ini memperkuat identitas Melanesia dan menantang eksploitasi sumber daya alam (seperti emas dan tembaga yang menghasilkan USD 8 miliar per tahun bagi Indonesia, tapi minim manfaat bagi

masyarakat lokal), ia juga menghadapi tantangan berupa represi militer dan korban sipil, yang kontraproduktif terhadap dukungan internasional.

Strategi Eksternal ULMWP ini mengadaptasi konsep Dekolonisasi menurut Greg Fry yang mengandalkan upaya diplomasi internasional dan solidaritas regional dalam mencapai Dekolonisasi. Dalam hal ini aktor-aktor kemerdekaan Papua Barat menggunakan keuntungan sebagai bangsa Melanesia yang tertindas untuk mendapatkan simpati dan dukungan kepada negara-negara bangsa Melanesia lainnya seperti Vanuatu. Kemudian mereka juga memanfaatkan organisasi internasional dan regional seperti Melanesian Spearhead Group (MSG) untuk mendapatkan dukungan. Selain itu mereka juga memanfaatkan media masa untuk menarik perhatian dunia internasional dengan dalih pelanggaran HAM yang terjadi di Papua Barat mulai dari rasisme, diskriminasi, hingga marginalisasi terhadap orang Papua.

Secara keseluruhan, Upaya Dekolonisasi ULMWP telah menciptakan tantangan dan dilema bagi pemerintah Indonesia dalam penyelesaian konflik ini bahkan jauh sebelum ULMWP didirikan. Dinamika-dinamika konflik yang terjadi di Papua Barat menyebabkan posisi Indonesia semakin terdesak oleh negara-negara lainnya karena isu pelanggaran HAM yang semakin lama semakin keras bergema oleh aktivis-aktivis pro kemerdekaan Papua maupun aktivis HAM.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa rekomendasi dan saran yang dapat peneliti berikan untuk meningkatkan pemahaman mengenai upaya Dekolonisasi yang terjadi di Papua Barat ini seperti :

1. Topik pada penelitian ini sangat jarang di bahas dan diteliti oleh peneliti sebelumnya bahkan

dikatakan belum pernah membahas tentang Dekolonisasi Papua Barat oleh ULMWP. Oleh karena itu peneliti menyarankan agar peneliti selanjutnya melanjutkan tema penelitian ini karena bisa dikatakan tema penelitian ini sangat unik dan bisa menggambarkan bagaimana dinamika sebenarnya yang terjadi di Papua Barat

2. Diperlukan pembaharuan dari segi konsep dan data-data terbaru terkait upaya-upaya Dekolonisasi yang dilakukan oleh ULMWP ke depannya karena isu ini menurut peneliti masih akan terus berlanjut hingga pemerintah Indonesia benar-benar bisa mengambil langkah-langkah akurat dan benar dalam penyelesaian konflik ini.

